

**KORELASI ANTARA TINGKAT PENDIDIKAN
DENGAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT
DESA KEDONDONG KECAMATAN GAJAH
KABUPATEN DEMAK**

Tiara Rahmawati¹, Didik Mulyadi²

Ilmu Admisistrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Abstract

In a democratic country, political participation is a fundamental requirement. It is assumed that political participation is influenced by the level of education. Based on this background, the research problem is whether there is a correlation between the level of education and political participation, and what is the profile of political participation in the community of Kedondong Village, Gajah Subdistrict, Demak Regency. The objectives are to determine whether there is a correlation between the level of education and political participation in Kedondong Village, Gajah Subdistrict, Demak Regency, and to understand the profile of political participation in the community of Kedondong Village, Gajah Subdistrict, Demak Regency. The population in this study consists of 3,246 individuals, with a sample size of 68 people, selected using the area sampling technique. There are two variables in this study: independent and dependent variables.

The research findings indicate that (1) There is a relationship between the level of education and political participation in the community of Kedondong Village, Gajah Subdistrict, Demak Regency. This is evidenced by the calculation results, with a serial coefficient (r_{ser}) of 0.71494, which is higher than the product moment correlation coefficient at both the 5% and 1% levels. (2) The profile of political participation in the community of Kedondong Village, Gajah Subdistrict, Demak Regency is influenced by the level of education. However, the background of participating in elections, reasons for voting in elections, and the use of voting rights are not affected by the level of education.

The study suggests that since education influences political participation in the community of Kedondong Village, Gajah Subdistrict, Demak Regency, it is necessary to raise awareness among the community about the importance of school education for their children. Additionally, the village officials of Kedondong Village, Gajah Subdistrict, Demak Regency should further motivate the community, especially those with basic education, to actively participate through socialization and political cadre training.

Keywords: Education, Political participation in the community.

Abstrak

Dalam negara demokrasi mensyaratkan adanya partisipasi politik. Diasumsikan partisipasi Politik dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah adakah korelasi antara tingkat pendidikan dengan partisipasi politik, dan bagaimana profil (gambaran) partisipasi politik masyarakat Desa Kedondong Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Adapun tujuannya adalah mengetahui adakah korelasi antara tingkat pendidikan masyarakat dengan partisipasi politik di Desa Kedondong Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, dan mengetahui bagaimana profil (gambaran) partisipasi politik masyarakat Desa Kedondong Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. Populasi dalam penelitian ini adalah 3246 orang. Pengambilan sampel sebanyak 68 orang, dengan menggunakan teknik area sampel. Variabel dalam penelitian ini ada 2 yaitu variabel bebas dan terikat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ada hubungan antara tingkat Pendidikan dengan partisipasi Politik masyarakat Desa Kedondong Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ". Hal itu dibuktikan berdasarkan hasil perhitungan, yaitu dengan koefisien serial (r_{ser}) sebesar 0,71494 lebih tinggi dari r label product moment, baik r 5% maupun r 1%. (2) Profil partisipasi politik masyarakat Desa Kedondong Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan. Sedangkan latar Belakang mengikuti pemilu, alasan memberikan suara pada pemilu dan penggunaan hak pilih tidak terpengaruh oleh tingkat pendidikan.

Kemudian dalam penelitian ini disarankan, yaitu bahwa Pendidikan berpengaruh terhadap partisipasi Politik masyarakat Desa Kedondong Kecamatan Gajah Kabupaten Demak maka perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan sekolah bagi putra - putrinya, dan para perangkat Desa Kedondong Kecamatan Gajah Kabupaten Demak harus lebih meningkatkan motivasi masyarakat terutama yang berpendidikan dasar untuk ikut berpartisipasi secara aktif melalui sosialisasi dan pelatihan kader politik.

Kata kunci: Pendidikan, Partisipasi politik masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi, rakyat mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh bangsa dan Negara. Karena setiap kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka rakyat tentu berhak ikut serta mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan itu. Secara umum dapatlah dikatakan kegiatan yang dilakukan warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah ini sebagai bentuk partisipasi politik. Seringkali terlihat bahwa warga Negara menyampaikan tuntutan, saran, koreksi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam berbagai bentuk mulai menyampaikan surat, datang ke lembaga perwakilan, menulis di surat kabar, hingga ke bentuk demokrasi.

Semua kegiatan diatas dilakukan dengan harapan bahwa tindakannya itu dapat diperhitungkan, yang akhirnya membawa perubahan dalam keadaan yang mereka pandang lebih baik.

Dalam Negara yang demokratis umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga Negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik,

karena diartikan bahwa banyak warga Negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.

Tetapi dalam kenyataannya walaupun ada persamaan hak, partisipasi politik tidak terbagi rata. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang. Pendapat dan latar belakang masyarakat yang berbeda-beda diasumsikan mempengaruhi partisipasi politik, sehingga partisipasi politiknya tidak sama. Hal ini dikarenakan ada faktor-faktor yang diduga mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, salah satu diantaranya adalah tingkat pendidikan.

Berdasarkan dari data penduduk Desa Kedondong yang berhubungan dengan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pendidikan Dasar	2.246
2.	Pendidikan Menengah	819
3.	Pendidikan Tinggi	181
	Jumlah	3.246

Sumber : Desa Kedondong 2020

Didalam penelitian ini penulis berusaha mengetahui korelasi diantara tingkat pendidikan masyarakat dengan partisipasi politik. Budiardjo (1994: 191) menyebutkan bahwa salah satu factor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah tingkat pendidikan. Pendidikan tidak hanya meningkatkan pengetahuan seseorang saja tetapi diharapkan dapat menjadikan seseorang semakin sadar, mampu dan kritis dalam menghadapi sesuatu yang terjadi dilingkungannya (kairudin, 1992: 31). Pendidikan sekolah memiliki penjenjangan dari dasar sampai tinggi yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Dengan semakin tinggi jenjang atau tingkat pendidikan seseorang, diharapkan semakin maju pula pola berfikirnya dan semakin luas pandangannya.

Berdasarkan alasan pemilihan judul diatas maka permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Adakah korelasi antara tingkat pendidikan masyarakat dengan partisipasi politik di Desa Kedondong Kecamatan Gajah kabupaten Demak?

2. Bagaimana profil (gambaran) partisipasi politik masyarakat Desa Kedondong Kecamatan Gajah Kabupaten Demak?

B. TINJAUAN TEORI

A

Pendidikan pada jaman sekarang merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan bagi kehidupan masyarakat. Karena disamping meningkatkan pengetahuan seseorang, pendidikan juga dapat memberikan perubahan pada beberapa hal:

- 1) Semakin timbulnya kesadaran bernegara dan bermasyarakat yang pada gilirannya memungkinkan mereka turut serta berperan secara aktif dalam memikirkan dan memperbaiki nasib bangsanya.
- 2) Semakin tumbuhnya kesadaran untuk memenuhi kewajiban yang terletak di atas pundaknya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab.
- 3) Semakin terbukanya pikiran dan akalunya untuk memperjuangkan haknya.
- 4) Pandangan semakin luas dan objektif dalam kehidupan bermasyarakat.
- 5) Semakin meluasnya cakrawala pandang dengan segala konsekuensinya.
- 6) Meningkatkan kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, yang tidak lagi semata-mata pada kebutuhan pokok, akan tetapi kebutuhan lainnya.
- 7) Meningkatkan kemampuan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi, baik pada tingkat individual maupun tingkat social
- 8) Pandangan yang semakin kritis terhadap hal-hal yang dilihat dan dirasakan sebagai suatu hal yang berlangsung tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Keterbukaan terhadap ide lain dan pandangan baru yang menyangkut berbagai segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- 10) Keterbukaan pada pergeseran nilai-nilai budaya dan social, baik yang timbul karena factor-faktor yang sifatnya endogen maupun yang sifatnya eksogen.

(Kairuddin, 1992 : 106)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan, khususnya pendidikan formal dapat menjadikan seseorang semakin sadar, objektif dan kritis

di dalam menghadapi sesuatu di lingkungannya dan sesuai dengan tingkat pendidikan formal yang ditempuh. Maka pengetahuan, kemampuan dan kepribadian yang terbentuk pada masing-masing individu berbeda-beda, hal yang berbeda tersebut diduga akan terkait dengan tingkat partisipasi politik masyarakat.

Zahara Idris (1992 : 31) berpendapat bahwa tujuan pendidikan ialah memberikan bantuan terhadap perkembangan anak didik seutuhnya. Hal ini semakin memperjelas bahwa kualitas manusia dapat ditingkatkan jika dia mampu mengembangkan potensi dirinya yaitu potensi fisik, sikap, moral, pengetahuan dan ketrampilan semaksimal mungkin agar menjadi manusia dewasa.

Secara hierarki tujuan pendidikan dapat dibedakan menjadi empat yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler dan tujuan instruksional.

1) Tujuan Pendidikan Nasional

Rumusan tujuan pendidikan nasional terdapat dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Dengan demikian semua kegiatan pendidikan harus diarahkan kepada tujuan pendidikan nasional.

2) Tujuan Institusional

Tujuan institusional adalah perumusan secara umum pola perilaku dan pola kemampuannya yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan tugas yang dipikul oleh setiap lembaga dalam rangka menghasilkan lulusan dengan ketrampilan tertentu.

3) Tujuan Kurikuler

Tujuan ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi.

4) Tujuan Instruksional

Yaitu tujuan yang hendak dicapai setelah selesai diselenggarakannya suatu proses pembelajaran.

Administrasi negara mempunyai banyak definisi yang berbeda satu sama lain, sesuai dengan cakupan dan pusat perhatian. Sekalipun demikian, jika administrasi negara

dibandingkan dengan organisasi sosial yang lain, maka segera terungkap bahwa administrasi negara mempunyai hal-hal yang bersifat khusus yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lainnya.

Paradigma ilmu administrasi publik dan manajemen pemerintahan telah banyak berubah dari yang sarwa negara ke sarwa masyarakat (Miftah Toha, 2008: 92). Oleh karenanya, pemahaman istilah *public* yang dilekatkan pada istilah *administration* dipahami sebagai proses pemerintahan yang selaras dengan perubahan paradigma tersebut. Sebelumnya, pengertian administrasi sangat beragam dari pakar satu dan lainnya. Administrasi menurut Sondang P. Siagian (Inu Kencana Syafiie, dkk: 2000, 14) diartikan sebagai keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan dilaksanakan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi publik sendiri terdiri dari dua kata, yaitu administrasi dan publik. Oleh karenanya, pemahaman istilah *public* yang dilekatkan pada istilah *administration* dipahami sebagai proses pemerintahan yang selaras dengan perubahan paradigma tersebut. Sebelumnya, pengertian administrasi sangat beragam dari pakar satu dan lainnya. Administrasi menurut Sondang P. Siagian (Inu Kencana Syafiie: 2000, 14) diartikan sebagai keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan dilaksanakan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Istilah publik berasal dari bahasa Inggris *public* yang artinya umum, masyarakat atau negara. Pengertian "umum" dapat dilihat dari istilah *public offering* (penawaran umum), *public ownership* (milik umum), *public service*

corporation (perseroan jasa umum), *public utility* (perusahaan umum) dan lainnya. Pengertian "masyarakat" dapat dilihat dari istilah *public relation* (hubungan masyarakat), *public service* (pelayanan masyarakat), *public opinion* (pendapat masyarakat), *public interest* (kepentingan masyarakat) dan lain-lain. Sedangkan pengertian "negara" dapat dilihat dari istilah *public authorities* (otoritas negara), *public building* (gedung negara), *public finance* (keuangan negara), *public revenue* (penerimaan negara), *public sector* (sektor negara) dan lain-lain. Menurut Inu Kencana Syafii, dkk (2000:18) arti *public* itu sendiri adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Dari pengertian dua kata tersebut, maka administrasi publik dapat diartikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan/kebijakan untuk kepentingan negara, warga masyarakat. Terdapat pengertian yang singkat, administrasi publik merupakan metode pemerintahan negara (proses politik) *administration of publik, for publik dan by publik*. Dengan demikian administrasi publik merupakan proses pemerintahan publik, untuk publik dan oleh publik.

Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden,

Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 158-160).

Santosa (2008), Pierre Landell Mills & Ismael Seregeldin mendefinisikan good governance sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi. Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar governance, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Secara filosofinya desa merupakan bagian dari pemerintahan, maka dari itu pemerintahan desa harus menjalankan perannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang peran pemerintah desa dan harus menjalankan amanat aturan Undang-Undang. Pembuatan kebijakan juga dianggap penting karena akan diimplementasikan guna memelihara, menjaga, dan memanfaatkan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat, berupa potensi-potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia.

Di sinilah Pemerintah Desa dapat hadir dari tahap awal hingga tahap akhir dalam penyelenggaraan usaha bagi pelaku UMKM yang ada di Desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan perekonomian. Apalagi pemerintah sebagai *regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator*.

Pemerintah Desa Tergo perlu menindaklanjuti Perbub tersebut dengan membuat regulasi atau peraturan di tingkat Desa bisa berupa Perdes atau Perkades. Semua itu dimaksudkan untuk dapat menjembatani dan menselaraskan dari Peraturan Bupati agar membudayakan kegiatan kewirausahaan di kalangan masyarakat Desa

Tergo, baik dalam naungan BUM-Des ataupun Koperasi-koperasi serta **memberikan akses kepada investor lain.**

Konsep pemberdayaan tersebut yang sesuai dengan penelitian ini adalah to give ability to atau to enable atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Karena dalam hal ini strategi ini dimaksudkan agar UMKM tersebut menjadi mampu bersaing dan lebih berdaya guna.

Shardlow dalam Rifa`i (2013), menjelaskan bahwa, pengertian mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok maupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Arsyad (2010: 115) bahwa, suatu desa/daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi meliputi beberapa indikator: 1. Peningkatan Kualitas SDM(Sumber Daya Manusia) 2. Membangun Kelembagaan Masyarakat 3. Menyediakan Fasilitas Produksi 4. Akses Modal 5. Kemudahan Dalam Akses Pasar Menurut Arsyad (2010: 375)⁵⁰ inti dari pembahasan tentang teori tersebut berkisar pada dua hal, yaitu berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu.

Dari berbagai uraian, mulai dari latar belakang, identifikasi masalah, perumusan, masalah hingga kajian teori, maka kerangka pikir penelitian mengadopsi dari Said Zainal Abidin (2004) adapun kriteria sebagai penentu kebijakan adalah sebagai berikut: a. Efektifitas, b. Efisien, c. Cukup, d. Adil, e. Terjawab.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini mengetahui permasalahan pokok yaitu Bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis UMKM Di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui observasi dan wawancara yang mendalam dengan informan penelitian yang berkompeten dan terkait dengan masalah yang diteliti (obyek yang diteliti) untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

Lokasi (*Locus*) penelitian ini adalah Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Sedangkan Fokus perhatiannya atau fenomena ataupun kajian yang diteliti adalah Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis UMKM Di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

D. Pembahasan

masyarakat tidak *gegap gempita* meniru *trend* yang sedang marak, mereka tetap dengan pendiriannya melakukan kegiatan menganyam dengan sesuka hati dan masyarakat tidak terprovokasi dengan meniru penggunaan alat-alat produksi yang berbau modern. Walaupun begitu tidak ada salahnya bagi Pemerintah Desa Tergo untuk dapat memperhatikan dengan memberikan pendampingan kepada masyarakat pengrajin anyaman daun pandan agar lebih dapat optimal menghasilkan karya-karya yang lebih banyak macam dan modelnya sesuai dengan permintaan pasar atau pembeli.

Permasalahan terkait kebijakan pemerintah Desa khususnya Desa Tergo dalam hal UMKM sudah menjadi rancangan desa, namun memang sampai sekarang belum dapat terealisasi karena masih adanya faktor-faktor lain yang perlu dipikirkan.

Ini menandakan Kepala Desa Tergo sebagai pemangku kepentingan dan orang yang memiliki kedudukan tinggi di Masyarakat Desa Tergo, sangat berhati-hati dalam mengambil dan membuat keputusan, walaupun itu untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat Desa Tergo.

Sebagai pemangku kepentingan dalam hal ini Pak kades sudah membuat kebijakan untuk sementara waktu belum bisa mengambil langkah-langkah terkait dengan regulasi ataupun kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat khususnya UMKM. Hal ini disebabkan masih perlunya pengkajian yang mendalam dan baik agar nantinya dengan dibuatnya kebijakan sampai pada implementasinya tetap sejalan serta bermanfaat bagi masyarakat.

Selaku Kepala Desa Tergo tidak pernah membedakan dalam memperlakukan masyarakatnya, ataupun kegiatan yang dilakukan masyarakatnya. Kepala Desa Tergo berupaya untuk memilah dan memilih serta menimbang kebijakan atau aturan yang diberlakukan, bukan berarti mengabaikan atau mengenyampingkan kegiatan UMKM tersebut. Alasannya adalah sebahagian kegiatan tersebut dipandang lebih pada kegiatan yang bersifat individu dan berorientasi pada *profit oriented*, walaupun begitu sebagai petinggi tetap berupaya agar

semua pihak pemangku kepentingan di Desa Tergo berperan aktif dalam kegiatan UMKM.

Sebagai pemangku di tingkat desa telah memberikan dukungan sebisanya walaupun dukungan tersebut belum tertuang dalam suatu aturan-aturan yang baku. Pihak desa selalu mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat terutama bagi pihak pemerintah desa untuk segera dapat merealisasikan aturan-aturan atau hal-hal yang mengatur keberadaan UMKM sebagai bentuk kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Tergo.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis UMKM Di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, terkait dengan : 1. Efektifitas, Konsep efektifitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Sehingga faktor-faktor yang selama ini menjadi kendala dalam proses kebijakan pemerintah desa adalah memang pemerintah Desa Tergo belum membuat semacam aturan atau regulasi ditingkat desa, baik berupa Perkades ataupun Perdes terkait pengembangan UKM. Harapan dari Masyarakat Desa Tergo bahwa dengan dibuatkannya regulasi ataupun sejenisnya untuk mencegah agar tidak ada pemaknaan kepentingan umum sesuai dengan kebutuhan individu. Selain itu juga untuk mencegah adanya peluang resistensi dari masyarakat pada kegiatan pengembangan masyarakat untuk berkreasi, setidaknya untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat usaha seperti jaminan peminjaman modal ke pihak ke-tiga dan masih banyak

lagi.; 2. Efisien, yang menjadi penghambat Kebijakan Desa Tergo dalam dalam mengembangkan UMKM, yaitu permasalahan pembuatan aturan berupa perdes ataupun perkades, di sisi lain konsep efisiensi erat kaitannya dengan rasio perbandingan antara output dengan input. Sehingga diperlukan adanya sebuah sinerginitas serta kebutuhan pembiayaan tidak dapat ditanggung sepenuhnya oleh anggaran dari desa. Sampai sekarang masyarakat pengrajin masih menunggu hasil keputusan yang belum jelas.; 3. Cukup, apabila kebijakan itu dibuat justru akan menjadi kekhawatiran bagi pihak desa Secara psikologis, bisa dikatakan bahwa masih banyak Kepala Desa, Aparat Desa atau pengambil dan pelaksana kebijakan yang alergi dengan kegiatan evaluasi. Sehingga ada kekhawatiran sangat dini bahwa jika evaluasi yang dilakukan menunjukkan hasil yang jelek, maka akan menghambat promosi mereka ke jenjang yang lebih tinggi atau mempermalukan diri sendiri. Dan bahkan mungkin dengan munculnya kebijakan pengembangan UMKM membutuhkan anggaran tertentu. ; 4. Adil , selaku pemangku kepentingan dirasa kurang siap atau kurang cakap ataupun kurang pengalaman dalam ranah kebijakan yang langsung mengena terhadap inti dari permasalahan di masyarakat. Adapaun bersifat bijaksana, artinya kebijakan tersebut harus bersifat adil dan tidak memikat serta kebijakan tersebut memiliki sifat memberi harapan bagi masyarakat untuk menjadi lebih baik.; 5. Terjawab, pada pelaksanaannya proses kebijakan dalam setiap tahapnya merupakan kegiatan yang begitu kompleks didalamnya yang melibatkan pihak-pihak dengan

berbagai kepentingan mereka masing-masing dan kerumitan bisa bertambah ketika kebijakan tidak dirumuskan secara jelas sebagai akibat kompromi-kompromi politik yang mewarnai proses perumusan kebijakan tersebut. Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

E. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah peneliti lakukan mengenai Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis UMKM Di Desa Tergo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

- a. Efektifitas, kemampuan masyarakat dalam mengolah sumber daya alam yang tersedia di lingkungan Desa Tergo sudah sangat efektif. Walaupun begitu tidak ada salahnya bagi Pemerintah Desa Tergo untuk membuat kebijakan berupa pembuatan perdes ataupun perkades agar dapat memberikan perhatian dengan berupa pendampingan kepada masyarakat pengrajin anyaman daun pandan agar lebih dapat optimal.
- b. Efisien, kemampuan masyarakat dalam mengolah sumber daya alam yang tersedia di lingkungan Desa Tergo sudah sangat efisien. Melalui UMKM ini sudah 75 % berhasil, itu disebabkan karena adanya keinginan masyarakat yang sangat tinggi untuk merubah ekonominya. Prosentase itu akan dapat bertambah apabila ada kontribusi berupa kebijakan dari pemerintah desa yang positif sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya Kebijakan tersebut.

- c. Cukup, Sebagai pemangku kepentingan dalam hal ini Pak kades sudah membuat kebijakan untuk sementara waktu belum bisa mengambil langkah-langkah terkait dengan regulasi ataupun kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat khususnya UMKM dan perlunya pengkajian yang mendalam dan baik
- d. Adil, Kepala Desa Tergo berupaya untuk memilah dan memilah serta menimbang kebijakan atau aturan, selain itu sebahagian kegiatan tersebut dipandang lebih pada kegiatan yang bersifat individu dan berorientasi pada *provit oriented*.
- e. Terjawab, sebagai pemangku di tingkat desa telah memberikan dukungan sebisanya walaupun dukungan tersebut belum tertuang dalam suatu aturan-aturan yang baku. Pihak desa selalu mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat terutama bagi pihak pemerintah desa untuk segera dapat merealisasikan aturan-aturan atau hal-hal yang mengatur keberadaan UMKM sebagai bentuk kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Tergo.

Kendala-kendala yang dihadapi antara lain, bahwa Pemerintah Desa Tergo belum membuat semacam aturan atau regulasi ditingkat desa, baik berupa Perkades ataupun Perdes terkait pengembangan UKM; diperlukan adanya sebuah sinerginitas dari semua pihak baik pemerintah desa, masyarakat dan juga tokoh masyarakat selain itu kebutuhan pembiayaan tidak dapat ditanggung sepenuhnya oleh anggaran dari desa; adanya kecemasan apabila kebijakan itu dibuat justru akan menjadi keawatiran bagi pihak desa Secara psikologis terkait dengan dampak

yang buruk bagi UMKM; Selaku pemangku kepentingan dirasa kurang siap atau kurang cakap ataupun kurang pengalaman dalam ranah kebijakan yang langung mengena terhadap inti dari permasalahan di masyarakat; Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis, *Skripsi "Responsivitas Dinas Koperasi dan UMKM Dalam Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah"* Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2015

Dinda Tauresia Ferian, *Skripsi "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di Desa Sukamulya Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Perspektif Ekonomi Islam"*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1438H/2017

UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1

Wawan Dhewanto, Fera Yunita, dkk. *Internasionalisasi UMKM Usaha Kecil dan Mikro Menuju Pasar Global*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2019), hlm. 1-2

UU RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 4 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Caiden G.E., 1982, Public Administration, Palisades Publisher, . California. Cohen, Steven and Eimicke William; Is Public Entrepreneurship

Ali Mufis, 2004. Penantar Administrasi. Negara. Jakarta : pusat penerbitan. Universitas Terbuka

Thoha, Miftah, 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Kencana, . Jakarta. Tjiptono, Fandy dan Diana, Anastasia, 2002.

Administratif Dan Operasional. Jakarta : Bumi Aksara. **Siagian, P Sondang.** (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia.14 halaman

Tulus T.H. Tambunan, UMKM di Indonesia, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hal.16)

Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 11

<https://endah240395.wordpress.com/2015/01/05/makalah-umkm/> diakses pada 12 November, pukul 19.15 WIB).

Tiktik Sartika Partomo&Abd. Rachman Soejoedono, "Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 13.)

<https://www.scribd.com/doc/314834468/> Pengertian-UMKM)

Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, hal. 1.

Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*,
(Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana 2010),
hal. 32)